

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek/Subyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pegawai yang terdapat pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Purworejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode *purposive sampling*, dimana sampel pada penelitian ini yaitu Kepala dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, pegawai yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan bendahara di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat pemerintah daerah kabupaten Purworejo yang memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden yang terdapat pada masing-masing SKPD yang berada pada wilayah kabupaten Purworejo.

Penyebaran dan pengembalian kuesioer dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019. Peneliti mengambil sampel pada 42 Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD) yang ada di Purworejo, yang terdiri atas 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat Dewan, 1 Inspektorat, 16 Dinas, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, 4 Badan, 1 Kantor, 1 RSUD, dan 16 Kecamatan. Berikut ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di kabupaten Purworejo yang menjadi obyek penelitian :

Tabel 4.1.
Daftar SKPD Kabupaten Purworejo

No	Nama SKPD
1	Sekretariat Daerah Kab. Purworejo
2	Sekretariat Dewan
3	Inspektorat Daerah Kab. Purworejo
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Pelayananana Terpadu Satu Atap
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Badan Kepegawaian Daerah
23	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama SKPD
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Rumah Sakit Umum Daerah
27	Kecamatan Grabag
28	Kecamatan Ngombol
29	Kecamatan Purwodadi
30	Kecamatan Bagelen
31	Kecamatan Kaligesing
32	Kecamatan Purworejo
33	Kecamatan Banyuurip
34	Kecamatan Bayan
35	Kecamatan Kutoarjo
36	Kecamatan Butuh
37	Kecamatan Pituruh
38	Kecamatan Kemiri
39	Kecamatan Bruno
40	Kecamatan Gebang
41	Kecamatan Loano
42	Kecamatan Bener

Peneliti menyebarkan 126 kuesioner dimana pada masing-masing SKPD diambil 3 responden. Sedangkan kuesioner yang kembali berjumlah 111 buah, dari 111 kuesioner yang kembali terdapat 10 responden yang tidak memenuhi kriteria dan terdapat 5 kuesioner yang tidak lengkap dalam pengisian

jawabannya sehingga kuesioner yang dapat di olah berjumlah 96 kuesioner.

Ringkasan penjelasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Data Klasifikasi	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
Jumlah kuesioner yang disebarakan	126	100
Jumlah kuesioner yang kembali	111	88,09
Jumlah kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak lengkap	5	3,97
Jumlah kuesioner yang kembali namun tidak memenuhi kriteria responden	10	7,94
Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis	96	76,19

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.2. diatas, menunjukkan bahwa peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 126 buah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Purworejo, namun kuesioner yang kembali hanya berjumlah 111 (88,09%) dimana terdapat 5 buah (3,97%) kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak lengkap dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan Purworejo. Serta 10 buah (7,94%) kuesioiner yang kembali namun tidak memenuhi kriteria responden. Sehingga kuesioner yang dapat dianalisis hanya berjumlah 96 buah (76,19%) kuesioner.

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, jabatan dan lama bekerja. Berikut merupakan hasil dari distribusi frekuensi setiap karakteristik dari 96 responden.

1. Jenis Kelamin

Perbandingan responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut ini:

Tabel 4.3.
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	51	53,1
Perempuan	45	48,9
Total	96	100

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 96 responden, sebagian besar responden yaitu sebanyak 51 orang dengan persentase 53,1% adalah laki-laki dan sebanyak 45 orang dengan persentase 48,9% adalah perempuan.

2. Umur

Perbandingan responden berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut ini :

Tabel 4.4.
Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
<25 tahun	2	2
25-40 tahun	32	33,3
>41 tahun	61	63,6
Tidak Mengisi	1	1,1
Total	96	100

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan pada Tabel 4.4. dapat dilihat bahwa total responden sebanyak 96 orang dengan berdasarkan tingkat umur, mayoritas umur responden lebih dari 41 tahun dengan presentase 63,6%, umur responden yang mendominasi kedua berkisar antara 25 – 40 tahun dengan presentase 33,3%. Selebihnya umur responden berada pada kisaran umur lain.

3. Pendidikan Terakhir

Perbandingan responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.5. berikut ini :

Tabel 4.5.
Responden berdasarkan pendidikan terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
D3	24	25
S1	50	52
S2	9	9,4
S3	0	0
Lainnya	9	9,4
Tidak Mengisi	4	4,2
Total	96	100

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.5. diketahui bahwa mayoritas jumlah responden yang bekerja pada bagian tata usaha akuntansi/ keuangan pada SKPD kabupaten Purworejo ialah responden dengan tingkat pendidikan terakhir strata satu (S1) sebanyak 50 responden atau dengan presentase 52%, kemudian jumlah responden yang mendominasi kedua adalah responden dengan pendidikan terakhir diploma tiga (D3) sebanyak 24 responden atau dengan presentase 25%, selebihnya tersebar pada tingkat pendidikan S2, S3, SMK dan SMA.

4. Latar Belakang Pendidikan

Perbandingan responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut :

Tabel 4.6.
Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Akuntansi	33	34,4
Manajemen	24	25
Ilmu Ekonomi	2	2,1
Lainnya	18	18,7
Tidak Mengisi	19	19,8
Total	96	100

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa mayoritas jumlah responden yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 33 responden dengan presentase 34,4%, kemudian responden yang mendominasi kedua berlatar belakang pendidikan manajemen sebanyak 24 responden dengan presentase 25%, selebihnya responden memiliki latar belakang pendidikan lain dan terdapat responden yang tidak mengisi.

5. Jabatan/ pangkat

Perbandingan responden berdasarkan tingkat jabatan dapat dilihat pada Tabel 4.7. berikut ini:

Tabel 4.7.
Responden berdasarkan tingkat jabatan

Jabatan/ pangkat	Frekuensi	Persentase(%)
Kasubag Keuangan	19	19,8
Bendahara	21	21,9
Pelaksana	38	39,6
Staf keuangan	7	7,3
Tidak Mengisi	11	11,4
Total	96	100

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan pada Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa total responden berdasarkan tingkat jabatan/ pangkat yang dimiliki yaitu sebanyak 19 (19,8%) responden sebagai Kasubag Keuangan, sebanyak 21 (21,9%) responden sebagai Bendahara, kemudian sebanyak 38 (39,6%) responden sebagai Pelaksana, kemudian sebanyak 7 (7,3%) responden sebagai staff keuangan dan sebanyak 11 (11,4%) responden yang tidak mengisi jabatannya.

6. Lama bekerja di SKPD saat ini

Perbandingan responden berdasarkan lama bekerja di SKPD saat ini dapat dilihat pada Tabel 4.8. berikut ini :

Tabel 4.8.
Responden berdasarkan lama bekerja di SKPD saat ini

Lama Bekerja di SKPD saat ini	Frekuensi	Persentase(%)
<1 tahun	0	0
1-5 tahun	25	26
6-10 tahun	28	29,2
>10 tahun	43	44,8
Total	96	100

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan pada Tabel 4.8. dapat dilihat bahwa total responden berdasarkan lama bekerja di SKPD saat ini yaitu selama <1 tahun tidak ada dengan persentase 0%, lama bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 25 (26%) responden, kemudian lama bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 28 (29,2%) responden dan >10 tahun sebanyak 16 (44,8%) responden.

B. Uji Kualitas Instrumen Data

1. Uji Validitas

Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan *Factor Analysis*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai *component matrix* $> 0,50$, Nazaruddin (2006). Berikut ini merupakan hasil uji validitas yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.9.
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen KLKPD

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	KLKPD1	0,810 > 0,50	,789	Valid
2	KLKPD2		,653	Valid
3	KLKPD3		,715	Valid
4	KLKPD4		,731	Valid
5	KLKPD5		,780	Valid
6	KLKPD6		,593	Valid
7	KLKPD7		,606	Valid
8	KLKPD8		,832	Valid
9	KLKPD9		,742	Valid
10	KLKPD10		,707	Valid
11	KLKPD11		,553	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Tabel 4.10.
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen SDM

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	SDM1	0,873 > 0,50	,643	Valid
2	SDM2		,758	Valid
3	SDM3		,681	Valid
4	SDM4		,798	Valid
5	SDM5		,827	Valid
6	SDM6		,706	Valid
7	SDM7		,741	Valid
8	SDM8		,770	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Tabel 4.11.
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen SAKD

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	SAKD1	0,855 > 0,50	,734	Valid
2	SAKD2		,713	Valid
3	SAKD3		,784	Valid
4	SAKD4		,820	Valid
5	SAKD5		,713	Valid
6	SAKD6		,799	Valid
7	SAKD7		,660	Valid
8	SAKD8		,774	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Tabel 4.12.
 Hasil Uji Validitas Variabel Dependen PTI

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	PTI1	0,835 > 0,50	,804	Valid
2	PTI2		,852	Valid
3	PTI3		,838	Valid
4	PTI4		,683	Valid
5	PTI5		,785	Valid
6	PTI6		,820	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Tabel 4.13.
 Hasil Uji Validitas Variabel Dependen SPI

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	SPI1	0,823 > 0,50	,815	Valid
2	SPI2		,825	Valid
3	SPI3		,812	Valid
4	SPI4		,548	Valid
5	SPI5		,833	Valid
6	SPI6		,849	Valid
7	SPI7		,514	Valid
8	SPI8		,596	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan tabel-tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua dimensi penelitian dikatakan valid karena telah memiliki nilai KMO > 0,50 serta memiliki nilai component matrix > 0,50. Dengan demikian 41 kuesioner dikatakan valid digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini adalah dengan melakukan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70, Gholzali (2011).

Tabel 4.14.
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
KLKPD(Y)	0,882	Reliabel
SDM(X1)	0,888	Reliabel
SAKD(X2)	0,886	Reliabel
PTI(X3)	0,869	Reliabel
SPI(X4)	0,896	Reliabel

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.14. dapat diketahui bahwa nilai hitung dari variabel indenpenden ke variabel dependen adalah reliabel. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,896, variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai sebesar 0,882, variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai 0,888, variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai sebesar 0,886 dan variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai sebesar 0,869. Dengan hasil hitung tersebut dapat dinyatakan pernyataan dalam penelitian ini memiliki nilai hitung > 0,70 sehingga dinyatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi dari asumsi regresi linear berganda pada penelitian ini. Uji asumsi klasik pada penelitian

ini terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah didalam suatu model regresi yang dipakai dalam penelitian, residualnya berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig > 0,05 (Ghozali, 2011). Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.1. :

Tabel 4.15.
Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-smirnov	Unstandardize Residual
Nilai Kolmogorov-smirnov	1,037
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,232

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.15. diatas dapat diketahui bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,232 > 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolenieritas

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah di dalam suatu model regresi linear berganda ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independennya atau tidak. Pada penelitian ini pengujian Multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF (*Variance*

Inflation Factor) dan nilai *Tolerance*. Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinieritas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,1$ (Ghozali, 2011). Berikut hasil uji multikolenieritas dapat dilihat pada Tabel 4.16. :

Tabel 4.16.
Uji Multikolenieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,551	1,814	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,349	2,863	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,490	2,040	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem Pengendalian Intern	0,379	2,638	Tidak terjadi multikolinearitas

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Dari Tabel 4.16. hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan diketahui bahwa nilai *variance inflation factor* (VIF) keempat variabel lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya.

Model regresi dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila $\text{sig} > 0,05$. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.17. :

Tabel 4.17.
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig	Kesimpulan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,880	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sistem Akuntansi Keuangan	0,963	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,784	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern	0,887	Tidak terjadi heteroskedastisitas

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.17. dapat diketahui bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2011).

Tabel 4.18.
Tabel Statistik Deskriptif

Variabel	N	Teoritis		Aktual		
		Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan Pemda	96	11-55	33	39-55	45,99	3,837
Kualitas Sumber Daya Manusia	96	8-40	24	22-40	33,00	3,299
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	96	8-40	24	27-40	33,95	3,123
Pemanfaatan Teknologi Informasi	96	6-30	18	18-30	25,24	3,500
Sistem Pengendalian Intern	96	8-40	24	26-40	34,41	3,144

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.18. hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.18. menunjukkan bahwa terdapat 96 responden. Pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 11-55 dengan mean sebesar 33. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 39-55 dengan mean sebesar 45,99 dengan standar deviasi 3,837. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden adalah setuju. Jawaban terbanyak kedua adalah sangat setuju. Selebihnya responden

menjawab dengan jawaban lain. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual $>$ mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo tinggi.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.18. menunjukkan bahwa terdapat 96 responden. Pada variabel kualitas sumber daya manusia memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 8-40 dengan mean sebesar 24. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 24-40 dengan mean sebesar 33,00 dengan standar deviasi 3,299. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden adalah setuju. Jawaban terbanyak kedua adalah sangat setuju. Selebihnya responden menjawab dengan jawaban lain. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual $>$ mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kualitas sumber daya manusia di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo tinggi.

c. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.18. menunjukkan bahwa terdapat 96 responden. Pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 8-40 dengan mean sebesar 24. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 27-40 dengan mean sebesar 33,95 dengan standar deviasi 3,123. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas

jawaban responden adalah setuju. Jawaban terbanyak kedua adalah sangat setuju. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata sistem akuntansi keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo tinggi.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.18. menunjukkan bahwa terdapat 96 responden. Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 6-30 dengan mean sebesar 18. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 18-30 dengan mean sebesar 25,24 dengan standar deviasi 3,500. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden adalah setuju. Jawaban terbanyak kedua adalah sangat setuju. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemanfaatan teknologi informasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo tinggi.

e. Sistem Pengendalian Intern

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.18. menunjukkan bahwa terdapat 96 responden. Pada variabel sistem pengendalian intern memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 8-40 dengan mean sebesar 24. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual sebesar 26-40 dengan mean sebesar 34,41 dengan standar deviasi

3,144. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden adalah sering. Jawaban terbanyak kedua adalah selalu sangat setuju. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata sistem pengendalian intern di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo tinggi.

2. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.19.
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	10,456	3,206		3,261	0,002
KSDM	0,111	0,104	0,096	1,068	0,288
SAKD	0,173	0,138	0,141	1,256	0,212
PTI	-0,075	0,104	-0,069	-0,723	0,471
SPI	0,810	0,132	0,664	6,151	0,000

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.18, rumus regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 10,456 + 0,111X_1 + 0,173X_2 - 0,075X_3 + 0,810X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

X₁ = Kualitas sumber daya manusia

X₂ = Sistem akuntansi keuangan daerah

X₃ = Pemanfaatan teknologi informasi

X₄ = Sistem pengendalian intern

ε = Error of estimation

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F atau uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

secara simultan. Kriteria penentuan uji F adalah tingkat signifikan 5%. Apabila nilai signifikan $F < \alpha 0,05$, maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen antara lain kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan sisetem pengendalian intern serta variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.20.
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	836,913	4	209,228	33,874	,000 ^a
Residual	562,076	91	6,177		
Total	1398,990	95			

(Sumber : Data primer – diolah 2018)

Berdasarkan Tabel 4.20. dapat diketahui bahwa nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dengan nilai f hitung sebesar 33,874. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan sisetem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Uji signifikan parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria hipotesis dinyatakan diterima apabila:

- 1) Nilai sig < α (0,05)
- 2) Koefisien regresi searah dengan hipotesis

Tabel 4.21.
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	10,456	3,206		3,261	0,002
KSDM	0,111	0,104	0,096	1,068	0,288
SAKD	0,173	0,138	0,141	1,256	0,212
PTI	-0,075	0,104	-0,069	-0,723	0,471
SPI	0,810	0,132	0,664	6,151	0,000

(Sumber : Data primer – diolah 2018)

Berdasarkan Tabel 4.21. uji parsial (t) dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji hipotesis pertama (H_1)

Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Tabel 4.8 kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar $0,288 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,111. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dijelaskan secara parsial, variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini tidak mendukung atau ditolak.

b. Uji hipotesis kedua (H_2)

Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Tabel 4.8 sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,212 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar $0,173$. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dijelaskan secara parsial, variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini tidak mendukung atau ditolak.

c. Uji hipotesis ketiga (H_3)

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Tabel 4.8 pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,471 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar $-0,075$. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dijelaskan secara parsial, variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini tidak mendukung atau ditolak.

d. Uji hipotesis keempat (H_4)

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Tabel 4.8 sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien

regresi sebesar 0,810. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dijelaskan secara parsial, variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini mendukung atau diterima.

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22.
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Ditolak
H ₂	Penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Ditolak
H ₃	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Ditolak
H ₄	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Diterima

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). Jika nilai R² mendekati satu, maka variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Tabel 4.23
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,773(a)	,598	,581	2,484

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan pada tabel 4.21 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,581. Ini berarti 58,1% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Variabel kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya sebesar 49,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

D. Pembahasan (Intepretasi)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pmerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar $0,288 > 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,068.

menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dikatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang juga berkualitas, karena sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menghasilkan keluaran (*output*) secara efisien dan efektif. Akan tetapi hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena masih terdapat sebagian pegawai yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan bendahara di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pada tingkat pemerintah daerah kabupaten Purworejo tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Dimana uraian proses dan fungsi akuntansi/keuangan hanya bisa dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki wawasan atau ilmu di bidang akuntansi. Pegawai yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan bendahara di SKPD Purworejo juga belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kemampuan para pegawai dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah..

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yenny et

al (2016) yang berpendapat bahwa variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,212 > 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,256. Dikatakan bahwa, semakin baik sistem akuntansi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin baik pula laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Akan tetapi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena kabupaten Purworejo belum sepenuhnya melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan. Dimana dalam penerapan sistem akuntansi pada SKPD belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, karena dalam menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam penyediaan informasi, namun pada kenyataannya SKPD kabupaten Purworejo belum bisa memberikan informasi tentang laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi

keuangan daerah. Jadi jelas bahwa untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014) yang berpendapat bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,471 > 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar $-0,723$. Dikatakan bahwa, semakin banyak pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah disebabkan karena masih terdapat beberapa daerah di kabupaten Purworejo yang masih belum sepenuhnya terkena jaringan koneksi internet dengan lancar, kemudian pemahaman pegawai mengenai teknologi informasi yang masih kurang

serta sarana dan prasarana yang digunakan seperti komputer, *software* maupun *hardware* yang masih kurang mendukung. Sebagian besar pegawai yang ada pada SKPD kabupaten Purworejo berumur antara 41 tahun hingga 55 dengan presentase sebesar 41,7%. Akan tetapi persentase usia pegawai diatas 55 tahun juga masih tersedia atau dapat dikatakan tidak kecil, yaitu sebesar 21,9%. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pegawai, karena umur merupakan faktor yang menunjang potensi seseorang untuk berkembang lebih maju dalam memantapkan pekerjaannya akibatnya tidak semua pegawai memahami penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan internet dan pemanfaatan *software*.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pramudiarta (2015) yang berpendapat bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar 6,151. Semakin kuat sistem pengendalian intern yang diterapkan, maka semakin baik laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Sistem pengendalian intern memiliki peran sebagai pengarah,

pengukur dan pengawas yang juga berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian intern pada dasarnya terdiri dari sekumpulan kebijakan dan prosedur yang secara khusus disusun untuk menjamin berjalannya suatu kegiatan dan ditaatinya suatu peraturan yang berlaku agar efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liza Mutiana (2017); Armel (2017); Kiranayanti (2016) yang telah membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.